# INTENSITAS HUBUNGAN PENDATAAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

**(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kuliner di Kawasan Alun-alun Kajen Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)


Oleh:

**IKA NURMILA**

**NIM 40122029**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**


**2026**

# INTENSITAS HUBUNGAN PENDATAAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

**(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kuliner di Kawasan Alun-alun Kajen Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)


Oleh:

**IKA NURMILA**

**NIM 40122029**


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

## NOTA PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ika Nurmila
2. NIM : 40122029
3. Judul : Intensitas Hubungan Pendataan, Penataan, dan Pembinaan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kuliner di Kawasan Alun-alun Kajen Pekalongan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2026

Yang Menyatakan

Ika Nurmila

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ika Nurmila

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
*c.q.* Ketua Program Studi Ekonomi
Syariah PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Ika Nurmila

NIM : 40122029

Judul Skripsi : **Intensitas Hubungan Pendataan, Penataan, dan Pembinaan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kuliner di Kawasan Alun-alun Kajen Pekalongan)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 14 Oktober 2026
Pembimbing,

**Indah Purwanti, M. T.**
NIP. 198701072019032011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan,
www.febi.uingusdur.ac.id

# PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Ika Nurmila** |
| NIM | : | **40122029** |
| Judul Skripsi | : | **Intensitas Hubungan Pendataan, Penataan, dan Pembinaan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kuliner di Kawasan Alun-alun Kajen Pekalongan)** |
| Dosen Pembimbing | : | **Indah Purwanti, M. T.** |

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

| Penguji I | Penguji II |
|---|---|
| **Prof. Dr. Susminingsih, M. Ag** | **Dr. Siti Aminah Chaniago, M. S. I** |
| NIP. 197502111998032001 | NIP. 196809072006042001 |

Pekalongan, 26 Oktober 2026
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.**
NIP. 197806162003121003

## MOTTO

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,"*

(QS An-Nisa': 58)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Yanti dan Bapak Rasdi tercinta atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan dan kepercayaan tanpa menuntut anaknya, mendampingi dengan penuh ketulusan, pengertian, dan doa. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas cinta serta perjuangan yang tidak akan pernah mampu terbalaskan sepenuhnya.
2. Kepada adik saya Rizqi terima kasih atas pengertian, doa, dan dukungannya
3. Almamater saya Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Indah Purwanti, M. T., yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Susminingsih, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Terima kasih kepada teman seperjuanganku, Fitriana Citra Nursandi dan Atha Nur Latifah yang membersamai, memberikan dukungan, menemani proses, menjadi tempat bercerita, berbagi keluh kesah dan perjuangan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman masa sekolahku yang sampai sekarang masih menjalani hubungan pertemanan dengan baik, Niken Rhenita dan Rima Maulida Khasanah yang telah mendoakan, menjadi tempat bercerita, berbagi keluh kesah, serta menemani secara tidak langsung dalam proses perkuliahan.
8. Kepada teman-teman Gank Gong dan ciwi-ciwi alumni PPL, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, mencurahkan keluh kesah, bertukar pikiran, serta saling memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan melalui setiap proses, meskipun tidak selalu berjalan mudah. Terima kasih telah berusaha, terus belajar, dan memilih untuk tetap melangkah di tengah berbagai keraguan serta tantangan yang dihadapi.

# ABSTRAK

**IKA NURMILA. Intensitas Hubungan Pendataan, Penataan, dan Pembinaan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kawasan Alun-alun Kajen Pekalongan)**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner di kawasan Alun-Alun Kajen Pekalongan menghadirkan persoalan dalam menyeimbangkan pemanfaatan ruang publik, ketertiban kawasan, dan keberlangsungan usaha pedagang. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan PKL oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja serta meninjaunya dalam perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, pengurus paguyuban, petugas retribusi, dan pedagang kaki lima kuliner, serta melalui observasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan daerah, peraturan bupati, dan dokumen terkait. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendataan dan penataan PKL dilakukan melalui pendataan administratif, penerbitan Stiker Binaan, serta pengaturan aktivitas dan lokasi berdagang. Stiker Binaan lebih berfungsi sebagai penanda administratif daripada instrumen pembinaan usaha secara langsung. Sementara itu, program pembinaan telah tersedia, tetapi penyalurannya melalui perwakilan paguyuban belum memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara langsung oleh seluruh pedagang yang diwawancarai. Dalam perspektif enam fitur sistem Maqashid Syariah Jasser Auda, temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan usaha dan kemaslahatan pedagang. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan tindak lanjut antara ketiga proses tersebut diperlukan untuk mendukung keberlangsungan usaha PKL dan mewujudkan kemaslahatan.



**Kata Kunci:** Pendataan, Penataan, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima, Maqashid Syariah Jasser Auda.

## ABSTRACT

**IKA NURMILA.** ***The Intensity of Data Collection, Regulation, and Guidance by the Department of Cooperatives, SMEs, and Labor from the Perspective of Jasser Auda's Maqashid al-Sharia (A Case Study of Street Vendors in the Kajen Pekalongan Town Square Area)***

*The presence of food street vendors in the Kajen Pekalongan Town Square area presents challenges in balancing the use of public space, maintaining order in the area, and ensuring the sustainability of the vendors' businesses. This study aims to analyze the relationship between the registration, management, and guidance of street vendors by the Department of Cooperatives, SMEs, and Labor and to examine it from the perspective of Jasser Auda's Maqashid al-Sharia.*

*This study employs a qualitative approach using a case study design. Primary data were collected through interviews with officials from the Office of Cooperatives, SMEs, and Labor; association leaders; fee collection officers; and street food vendors, as well as through observation. Secondary data were obtained from local regulations, regent regulations, and related documents. Data validity was verified through source triangulation, while data analysis employed an interactive model encompassing data collection, data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification.*

*The research findings indicate that the registration and organization of street vendors are carried out through administrative data collection, the issuance of "Binaan" stickers, and the regulation of trading activities and locations. The "Binaan" stickers serve more as administrative markers than as direct business development tools. Meanwhile, guidance programs are available, but their delivery through association representatives has not ensured that all interviewed vendors directly benefit from them. From the perspective of Jasser Auda's six features of the Maqashid Syariah system, these findings indicate that the relationship between data collection, organization, and guidance has not yet been fully integrated with the needs for business development and the welfare of vendors. Therefore, strengthening coordination and follow-up among these three processes is necessary to support the sustainability of street vendors' businesses and achieve the common good.*



***Keywords:*** *Data Collection, Regulation, Capacity Building, Street Vendors, Jasser Auda's Maqashid Syariah.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan penyusunan skripsi tidak lepas dari doa, dukungan, dan bantuan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Muhammad Aris Safi'i, M.E.I., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Indah Purwanti, M.T., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Prof. Dr. Susminingsih, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik di masa perkuliahan;
6. Kedua orang tua yang telah mencurahkan doa, dukungan, dan kasih sayang, serta memberikan bantuan moral maupun material dengan penuh keikhlasan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 12 Oktober 2026

Ika Nurmila

## DAFTAR ISI

**LEMBAR JUDUL** ..... **i**
**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA** ..... **i**
**NOTA PEMBIMBING** ..... **iii**
**PENGESAHAN** ..... **iv**
**MOTTO** ..... **v**
**PERSEMBAHAN** ..... **vi**
**ABSTRAK** ..... **vii**
**ABSTRACT** ..... **viii**
**KATA PENGANTAR** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **x**
**TRANSLITERASI ARAB-LATIN** ..... **xii**
**DAFTAR TABEL** ..... **xxi**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xxii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xxiii**
**BAB I** ..... **1**
**PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 10
C. Pembatasan Masalah ..... 10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 11
E. Sistematika Pembahasan ..... 13
**BAB II** ..... **15**
**LANDASAN TEORI** ..... **15**
A. Landasan Teori ..... 15
B. Telaah Pustaka ..... 25
C. Kerangka Berpikir ..... 36
**BAB III** ..... **37**
**METODE PENELITIAN** ..... **37**
A. Jenis Penelitian ..... 37
B. Pendekatan Penelitian ..... 37

C. Setting Penelitian ..... 38
D. Subjek Penelitian ..... 38
E. Sumber Data ..... 39
F. Teknik Pengumpulan Data ..... 39
G. Teknik Keabsahan Data ..... 40
H. Metode Analisis Data ..... 40
**BAB IV ..... 43**
**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ..... 43**
A. Gambaran Umum Lokasi/Subjek Penelitian ..... 43
B. Intensitas Hubungan Pendataan, Penataan, dan Pembinaan PKL oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja ..... 48
C. Intensitas Hubungan Pendataan, Penataan, dan Pembinaan dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda ..... 60
**BAB V ..... 72**
**PENUTUP ..... 72**
A. Simpulan ..... 72
B. Saran ..... 72
C. Keterbatasan Penelitian ..... 74
**DAFTAR PUSTAKA ..... 75**
**LAMPIRAN ..... I**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

**1. Konsonan**

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |

| | | | |
|---|---|---|---|
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ` | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Dhammah | U | U |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ◌َ ي ْ | fathahdanya | Ai | a dani |
| ◌َ و ْ | fathahdanwau | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - żukira

يَذْهَبُ - yażhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

**3. Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|---|---|---|---|
| ا...ى...َ | Fathah dan alif atau ya | A | a dan garis di atas |
| ...ِ ى | Kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |
| ...ُ و | Hammah dan wau | U | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيْلَ - qĩla

**4. Ta'marbuṭah**

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

   Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

   Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

   Contoh:

   الْأَطْفَالُ رَوْضَةُ - rauḍah al-aṭfāl

   - rauḍatulaṭfāl

   الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

   - al-Madīnatul-Munawwarah

   طَلْحَةْ - talḥah

**5. Syaddad**

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نزَّلَ - nazzala

البِرّ - al-birr

الحجّ - al-ḥajj

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

   Contoh:

الرَّجُلُ - rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الجَلاَلُ - al-jalālu

**7. hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأْخُذُوْنَ - ta'khużūna

اَلنَّوْءُ - an-nau'

شَيْئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

**8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqĭn

Wainnallāhalahuwakhairrāziqĭn

| | |
|---|---|
| وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا | Wa auf al-kaila wa-almĭzān |
| | Wa auf al-kaila wal mĭzān |
| الْخَلِيل إِبْرَاهِيمُ | Ibrāhĭm al-Khalĭl |
| | Ibrāhĭmul-Khalĭl |
| وَمُرْسَاهَا مَجْرَاهَا اللّٰهِ بِسْمِ | Bismillāhimajrehāwamursahā |
| مَنِ الْبَيْتِ حِجُّ النّاسِ عَلَى وَلِلّٰهِ سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ | Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabĭla |
| | Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabĭlā |

**9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| رَسُولٌ إِلّا مُحَمّدٌ وَمَا | Wa mā Muhammadun illā rasl |
| لَلّذِي لِلنّاسِ وُضِعَ بَيْتٍ أَوّلَ إِنّ مُبَارَكًا بِبَكّةَ | Inna awwalabaitinwuḍi’alinnāsilallażībibakkatamubārakan |

| | |
|---|---|
| فِيهِ أُنْزِلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ | Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur'ānu |
| الْقُرْآنُ | Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭhil Qur'ānu |
| الْمُبِينُ الْأُفُقُ رَآهُ وَلَقَدْ | Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubĭn |
| | Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubĭn |
| الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ | Alhamdulillāhirabbil al-'ālamĭn |
| | Alhamdulillāhirabbilil 'ālamĭn |

Penggunaan huruf awal capital hanyauntuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

| | |
|---|---|
| قَرِيبٌ وَفَتْحٌ اللَّهِ مِنَ نَصْرٌ | Naṣrunminallāhiwafathunqarĭb |
| جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ | Lillāhi al-amrujamĭ'an |
| | Lillāhil-amrujamĭ'an |
| عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ | Wallāhabikullisyai'in 'alĭm |

**10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kajen Pekalongan..... 4

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian ..... 36
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja ..... 44

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara ..... I
Lampiran 2 Transkrip Wawancara ..... VI
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian ..... XX
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian ..... XXI
Lampiran 5 Dokumentasi ..... XXII
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup ..... XXIV

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian integral dari sektor ekonomi informal yang berkembang di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, keberadaan sektor informal sering kali berkaitan dengan ketidakseimbangan penyerapan tenaga kerja formal, keterbatasan akses modal, serta rendahnya kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (Khairi & Marsoyo, 2022). Pedagang kaki lima berperan sebagai strategi adaptasi sosial-ekonomi yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mencari nafkah melalui kegiatan perdagangan skala kecil di ruang publik.

Di Indonesia, pedagang kaki lima tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa dengan harga terjangkau, tetapi juga berperan dalam menyerap tenaga kerja serta memperkuat dinamika ekonomi lokal. Namun, keberadaan PKL di ruang publik dapat menimbulkan persoalan terkait ketertiban, estetika, dan penataan ruang (Butarbutar & Yusuf, 2025). Kondisi tersebut menuntut adanya keseimbangan antara penataan dan pembinaan agar kebijakan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada ketertiban administratif, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pedagang.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan membina aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor informal seperti pedagang kaki lima. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi sebagai regulator dalam penataan,

fasilitator dalam pemberian pembinaan, serta katalisator dalam mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil (Jaelani & Fidaris, 2024). Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui penataan lokasi dan aktivitas perdagangan, pendataan pedagang, serta penyediaan program pembinaan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Peran pemerintah dalam menata ekonomi rakyat sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana terkandung dalam QS An-Nisa' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

> Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang amanah wajib menjalankan kebijakan secara adil dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat. Pengaturan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, 2017), yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2019 (Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, 2019). Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dalam melakukan pembinaan, penataan, pendataan, serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima.

Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan keteraturan ruang publik sekaligus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Pada kenyataan praktik pelaksanaannya, kebijakan publik terhadap pedagang kaki lima di berbagai daerah masih sering menghadapi tantangan, seperti distribusi program yang belum merata, keterbatasan akses pelaku terhadap fasilitas pembinaan, serta ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kebutuhan riil di lapangan (Ramadan et al., 2025). Dalam kondisi tersebut, keberadaan program pendataan, penataan, dan pembinaan saja belum cukup untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dijalankan. Hubungan antara ketiganya juga perlu diperhatikan, terutama mengenai bagaimana informasi hasil pendataan digunakan dalam penataan dan apakah pelaksanaan penataan tersebut diikuti dengan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pedagang.

Kawasan Alun-Alun Kajen merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang bukan hanya ruang publik tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya serta menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang tumbuh secara dinamis (Widjajanti et al., 2023). Posisi strategis tersebut menjadikan kawasan ini sebagai titik konsentrasi pedagang kaki lima yang menyediakan berbagai kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil pendataan dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, mayoritas pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kajen bergerak pada sektor kuliner sebanyak 407 usaha. Selanjutnya, usaha pakaian dan aksesoris berjumlah 118 usaha, permainan anak sebanyak 35 usaha, kategori lainnya sebanyak 14 usaha, perabotan sebanyak 3 usaha, serta pedagang yang memiliki lebih dari satu usaha sebanyak 3. Data tersebut

menunjukkan bahwa sektor kuliner mendominasi aktivitas perdagangan di kawasan Alun-Alun Kajen dibandingkan jenis usaha lainnya.

*Tabel 1. Jenis Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kajen Pekalongan*

| Kelompok Usaha | Jumlah |
|---|---|
| Kuliner | 407 |
| Pakaian/Aksesoris | 118 |
| Permainan Anak | 35 |
| Lainnya | 14 |
| Perabotan | 3 |
| Memiliki lebih dari 1 usaha | 3 |
| Total | 580 |

Sumber: Dokumen Resmi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Berdasarkan kondisi di lapangan, pedagang kaki lima kuliner di kawasan Alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan tersebar di berbagai titik dengan tingkat kepadatan dan waktu operasional yang berbeda. Penataan lokasi berjualan serta pengaturan aktivitas perdagangan menjadi bagian dari upaya pengelolaan kawasan tersebut. Pengelolaan pedagang kaki lima tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha pedagang. Oleh karena itu, pendataan, penataan, dan pembinaan perlu dipahami sebagai aspek-aspek yang saling berhubungan dalam pengelolaan pedagang kaki lima, bukan semata-mata sebagai kegiatan administratif dan pengaturan lokasi.

Upaya Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dalam mengelola kawasan Alun-Alun Kajen telah menerapkan kebijakan spesifik yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan estetika kota dengan keberlangsungan ekonomi lokal. Kebijakan ini merupakan turunan dari amanat Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2019, di mana dinas melakukan

pengaturan tata letak, zonasi pedagang kuliner, hingga penetapan jam operasional bagi para pelaku usaha informal (Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, 2019). Pihak dinas berupaya menciptakan ekosistem usaha yang lebih terukur dan terkendali di pusat pemerintahan.

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam pengelolaan PKL di kawasan Alun-Alun Kajen adalah penerbitan Stiker Pedagang Binaan yang ditempelkan pada gerobak pedagang. Stiker tersebut berfungsi sebagai penanda administratif bagi pedagang yang telah terdata oleh dinas. Keberadaannya berkaitan dengan pendataan dan pengaturan PKL, tetapi fungsi tersebut perlu dibedakan dari pembinaan usaha secara langsung. Dengan demikian, Stiker Binaan menjadi salah satu bagian yang relevan untuk dikaji dalam melihat hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan PKL. Persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya keberadaan stiker sebagai penanda, melainkan juga bagaimana pendataan yang dilakukan melalui kebijakan tersebut berhubungan dengan tindak lanjut penataan dan pembinaan pedagang.

Keberadaan pedagang kaki lima di berbagai kota dan kabupaten kerap menghadirkan persoalan dalam pengelolaan ruang perkotaan, terutama terkait penataan lokasi berjualan, kebersihan lingkungan, dan ketertiban umum (Pristika & Kurniawan, 2021). Dalam konteks Alun-Alun Kajen, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perencanaan fisik kawasan, tetapi juga hubungan antara pengaturan aktivitas perdagangan dan keberlangsungan usaha PKL. Kebijakan yang berorientasi pada penataan perlu mempertimbangkan informasi mengenai kondisi pedagang, sedangkan pembinaan perlu memperhatikan kebutuhan usaha

dan kondisi yang dihadapi setelah penataan dilaksanakan. Apabila ketiga aspek tersebut belum terhubung secara optimal, tujuan penataan kawasan dan pengembangan usaha pedagang berpotensi belum tercapai secara bersamaan.

Penelitian ini tidak didasarkan dari anggapan bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tidak menjalankan tugasnya. Fokus penelitian terletak pada bagaimana pendataan, penataan, dan pembinaan dilaksanakan serta sejauh mana ketiganya saling berhubungan dalam mendukung kebutuhan dan keberlangsungan usaha PKL di kawasan Alun-Alun Kajen. Pendekatan kebijakan *top-down* sering kali gagal menangkap inti permasalahan di lapangan karena cenderung mengabaikan keterkaitan yang ada dalam ekonomi informal (Faqih, 2025). Maka dari itu, dibutuhkan kerangka teoretis untuk memahami kebijakan regulasi sebagai suatu sistem yang menyeluruh, adaptif, dan saling berkaitan, sehingga perencanaannya tidak menimbulkan dampak merugikan terhadap keberlangsungan mata pencaharian para pedagang.

Penelitian ini menganalisis masalah dengan menggunakan teori Maqashid Syariah karya Jasser Auda, yang mencakup *Cognition* (kognisi), *Wholeness* (keutuhan), *Openness* (keterbukaan), *Interrelated hierarchy* (hierarki saling keterkaitan), *Multidimensionality* (multidimensionalitas) dan *Purposefulness* (bertujuan) (Murti, 2021). Pendekatan ini dipilih karena memandang suatu kebijakan sebagai sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan. Melalui pendekatan sistem tersebut, pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap PKL tidak hanya ditinjau dari keberadaan aturan dan kegiatan administratif, tetapi

juga dari hubungan antarproses, keterbukaan terhadap kebutuhan lingkungan, serta tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai.

Aspek *Cognition* digunakan untuk mengkaji sejauh mana pendataan dan kebijakan yang dijalankan mencerminkan pemahaman terhadap kondisi serta kebutuhan PKL. Aspek *Wholeness* digunakan untuk melihat hubungan antara aspek pendataan, penataan ruang, dan pembinaan usaha sebagai bagian dari satu sistem pengelolaan PKL. Aspek *Openness* digunakan untuk menganalisis keterbukaan komunikasi antara dinas, pengurus paguyuban, dan pedagang dalam penyampaian informasi serta pelaksanaan program. Sementara itu, Aspek *Interrelated Hierarchy* digunakan untuk menelaah hubungan antara regulasi, kebijakan dinas, dan pelaksanaannya di lapangan.

Aspek *Multidimensionality* digunakan untuk menganalisis persoalan pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk ketertiban kawasan dan keberlangsungan usaha pedagang. Adapun aspek *Purposefulness* digunakan untuk menelaah sejauh mana pendataan, penataan, dan pembinaan diarahkan pada tujuan yang mendukung kemaslahatan pedagang. Melalui keenam fitur tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara kebijakan dan pelaksanaannya dengan memperhatikan prinsip keadilan serta perlindungan harta (*hifz al-mal*) (Fadilah, 2025). Analisis tersebut tidak dimaksudkan untuk menganggap seluruh tujuan kebijakan telah tercapai, tetapi untuk mengidentifikasi bagian yang telah berjalan dan bagian yang masih perlu diperkuat berdasarkan temuan penelitian.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penataan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dikaji melalui kebijakan pemerintah, upaya menjaga keberlanjutan usaha, serta perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda untuk menganalisis permasalahan kontemporer. Penelitian Zakiya dan Prastyawan mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung penataan dan pemberdayaan pedagang (Zakiya & Prastyawan, 2025). Selanjutnya, penelitian Sunarko dkk. mengenai peran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Surabaya dalam pemulihan keberlanjutan Sentra Wisata Kuliner Wonorejo membahas peran pemerintah dalam mendukung keberlangsungan usaha kuliner (Sunarko et al., 2024). Menurut studi lain yang dilakukan oleh Vega dkk., menyediakan sentra kuliner yang terorganisir dapat memberdayakan pedagang kaki lima dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal (Vega et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramono dan Hanandini menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha pedagang kaki lima serta kebersihan ruang publik dapat sama-sama memberikan dampak positif melalui penerapan langkah-langkah pemberdayaan dan restrukturisasi bagi mereka (Pramono & Hanandini, 2022). Sementara itu, Irawan mengkaji pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda sebagai pendekatan alternatif untuk menganalisis permasalahan kontemporer (Irawan, 2022). Penelitian tersebut menjadi landasan bagi penelitian ini dalam mengkaji penataan pedagang kaki lima, dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan usaha, dan penggunaan perspektif Jasser Auda. Berbeda dari fokus masing-masing

penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus menganalisis intensitas hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan pedagang kaki lima kuliner oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja di kawasan Alun-Alun Kajen Pekalongan dalam perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

Temuan dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan sektor informal, khususnya pedagang kecil yang beraktivitas di ruang publik. Penelitian tersebut juga telah membahas penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dari aspek kebijakan publik, ekonomi, dan tata kelola ruang publik. Penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran mengenai penataan, pemberdayaan, dan pengelolaan PKL dari sisi kebijakan publik, ekonomi, dan tata kelola ruang publik. Namun, penelitian ini mengambil fokus yang lebih spesifik, yaitu hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan PKL dalam pelaksanaan kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja di kawasan Alun-Alun Kajen Pekalongan. Perhatian terhadap hubungan ketiga aspek tersebut penting karena pendataan administratif, pengaturan aktivitas perdagangan, dan penyediaan program pembinaan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa ketiganya telah terintegrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini selanjutnya menggunakan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda untuk menganalisis hubungan tersebut dan kaitannya dengan kemaslahatan pedagang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada intensitas hubungan pendataan, penataan, dan pembinaan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja terhadap pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kajen

Pekalongan. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketiga aspek tersebut dilaksanakan, bagaimana hubungan di antara ketiganya tercermin dalam praktik di lapangan, serta bagaimana pelaksanaannya ditinjau melalui enam fitur sistem Maqashid Syariah Jasser Auda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan upaya mewujudkan kemaslahatan serta keberlangsungan usaha PKL.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana intensitas hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja di kawasan Alun-alun Kajen Pekalongan?
2. Mengapa intensitas hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima kuliner di kawasan Alun-alun Kajen Pekalongan masih lemah?
3. Bagaimana intensitas hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda?

## C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian tetap terarah dan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki beberapa batasan.

1. Penelitian ini difokuskan pada intensitas hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan di kawasan Alun-Alun Kajen Pekalongan. Pembahasan mencakup pendataan pedagang kaki lima, termasuk melalui Stiker

Binaan, pengaturan aktivitas dan lokasi berdagang, serta pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan usaha pedagang kaki lima. Penelitian tidak membahas secara mendalam peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penataan PKL, tetapi tetap memperhatikan koordinasi dengan OPD maupun pihak terkait sejauh berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur efektivitas maupun dampak kebijakan terhadap pedagang kaki lima, melainkan menganalisis bagaimana pendataan, penataan, dan pembinaan dilaksanakan serta sejauh mana ketiganya memiliki hubungan dan tindak lanjut yang saling mendukung. Analisis dilakukan menggunakan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda melalui enam fitur sistemnya, dengan memperhatikan aspek maslahah dalam mendukung keberlangsungan usaha dan kemaslahatan pedagang kaki lima.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis intensitas hubungan pendataan, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner di kawasan Alun-Alun Kajen Pekalongan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya intensitas hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner di kawasan Alun-Alun Kajen Pekalongan.
3. Untuk menganalisis intensitas hubungan pendataan, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner di kawasan Alun-Alun

Kajen Pekalongan berdasarkan enam fitur sistem Maqashid Syariah Jasser Auda.

**2. Manfaat Penelitian**

***a. Manfaat Teoritis***

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian di bidang Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pembangunan, khususnya mengenai hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian mengenai kebijakan publik dalam perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, terutama dalam menganalisis intensitas hubungan antara proses pendataan, penataan, dan pembinaan serta kaitannya dengan kemaslahatan PKL.

***b. Manfaat Praktis***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, dalam mengevaluasi dan memperkuat hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan PKL di kawasan Alun-Alun Kajen Pekalongan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pedagang. Bagi PKL, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pendataan, penataan, dan pembinaan dalam mendukung

keberlangsungan usaha serta kemaslahatan pedagang.

## E. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab ini berfungsi untuk memberikan arahan terhadap masalah penelitian yang diuraikan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan tinjauan pustaka yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu intensitas hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner di kawasan Alun-Alun Kajen Pekalongan. Pembahasan juga mencakup perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda melalui enam fitur sistemnya sebagai kerangka analisis untuk mengkaji hubungan antara ketiga proses tersebut.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta dasar pertimbangannya, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta metode analisis data yang diterapkan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai intensitas hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner di kawasan Alun-Alun Kajen Pekalongan. Pembahasan mencakup pelaksanaan ketiga proses tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan hubungan di antara ketiganya

masih lemah, serta analisis berdasarkan enam fitur sistem Maqashid Syariah Jasser Auda.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir memuat simpulan, saran dan keterbatasan penelitian. Simpulan disusun secara ringkas berdasarkan seluruh temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Temuan tersebut diperoleh melalui proses analisis dan interpretasi data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Rekomendasi atau saran guna pengembangan penelitian selanjutnya untuk memperluas hasil temuan dan melengkapi keterbatasan penelitian.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Kebijakan Stiker Binaan di kawasan Alun-Alun Kajen Pekalongan pada praktiknya lebih berfungsi sebagai penanda pendataan PKL daripada instrumen pembinaan usaha secara langsung. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja juga berperan dalam pengaturan aktivitas berdagang serta penyediaan program pembinaan, tetapi akses dan manfaat pembinaan belum dirasakan secara merata oleh pedagang kaki lima selaku informan. Dalam perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda melalui enam fitur, temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pendataan, penataan, dan pembinaan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pelaksanaannya. Persoalan utama yang ditemukan bukan terletak pada ketiadaan peran Dinas, melainkan pada belum kuatnya keterkaitan ketiga proses tersebut dalam menghubungkan kebutuhan pedagang dengan pengaturan lokasi dan akses terhadap program pembinaan guna mendukung keberlangsungan usaha serta kemaslahatan pedagang kaki lima.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, diharapkan dapat mempertahankan dan mengembangkan kegiatan pendataan, penataan, dan pembinaan PKL secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pembinaan hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pedagang, terutama melalui kegiatan yang bersifat praktis dan memberikan kesempatan bagi pedagang untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Selain itu, diperlukan tindak lanjut terhadap rencana penataan kawasan agar pelaksanaannya dapat mempertimbangkan kebutuhan pedagang dan kondisi di lapangan.

2. Bagi pedagang kaki lima dan paguyuban di kawasan Alun-alun Kajen, diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan serta mematuhi ketentuan penataan yang berlaku. Pedagang dan paguyuban juga diharapkan dapat memanfaatkan saluran komunikasi dengan pihak terkait untuk menyampaikan kebutuhan, kendala, dan aspirasi, sehingga pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan dapat mempertimbangkan kondisi yang dihadapi para pedagang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kajen dapat dikembangkan dengan mengkaji perkembangan penataan kawasan, tindak lanjut rencana relokasi, serta pelaksanaan dan manfaat pembinaan usaha bagi pedagang secara lebih mendalam. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas cakupan informan atau lokasi penelitian ke kawasan pedagang kaki lima lainnya di Kabupaten Pekalongan agar diperoleh gambaran yang lebih beragam mengenai pelaksanaan pendataan, penataan, dan pembinaan pedagang kaki lima.

## C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami temuan yang diperoleh, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan yang terdiri atas pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, petugas retribusi, pengurus paguyuban, serta beberapa PKL. Penelitian ini belum mencakup seluruh PKL yang berada di kawasan Alun-Alun Kajen. Temuan penelitian menggambarkan pengalaman dan pandangan informan yang diwawancarai dan belum dapat mewakili seluruh pengalaman serta pandangan PKL di kawasan tersebut.
2. Penelitian ini belum menggambarkan secara menyeluruh jangkauan dan manfaat program pembinaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja bagi pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kajen. Hal ini karena tidak semua pedagang kaki lima yang menjadi informan pernah mengikuti atau merasakan pembinaan secara langsung, sedangkan informasi mengenai kegiatan pembinaan juga diperoleh dari pihak Dinas dan pengurus paguyuban. Selain itu, program yang diselenggarakan tidak selalu dikhususkan bagi pedagang kaki lima Alun-Alun Kajen, mengingat cakupan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA


Adinugraha, H. H., & Rismawati, S. D. (2025a). *Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah*. PT Nasya Expanding Management.

Adinugraha, H. H., & Rismawati, S. D. (2025b). *Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah* (A. T. Surur (ed.)). PT Nasya Expanding Management.

Agustine, J. (2025). *Pekerja Informal Bertambah, Pemerintah Diminta Perkuat Kebijakan Ekonomi Inklusif*. Liputan/Berita Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/id/berita/pekerja-informal-bertambah-pemerintah-diminta-perkuat-kebijakan-ekonomi-inklusif/

Alamsyah, T., Musyahid, A., & Sultan, L. (2025). Konstruksi Maqashid Syariah menurut Jasser Auda dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Teori dan Implementasinya. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 46–59. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/download/14728/2819

Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Edisi Terj). Mizan.

Azura, D. L., Valentina, T. R., & Putri, I. A. (2024). Implementasi Peraturan Daerah No . 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, *4*(5), 1531–1537. https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2283

Butarbutar, J. M., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di Trotoar Jakarta : Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *3*(3), 768–772. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2123

Cardona, D. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima* (I. Silviani (ed.)). PT Scopindo Media Pustaka. https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/80117953-9e09-432d-95d5-7b9a934e2c2d

Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, *2*(6), 1–18. https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/196

Faqih, M. (2025). *Manajemen Holistik: Integrasi Sistem untuk Mengatasi Akar Permasalahan Bisnis* (Cetakan Pe). CV. Sketsa Media. https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/download/499/259#:~:text=Menurut penelitian oleh Farhan dan. Oktaviani (2022)%2C,cenderung gagal karena mengabaikan dimensi sosial dan.

Handoko. (2026). *Wawancara Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kajen*.

Humas. (2023). *Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Kabinet Republik

Indonesia. https://setkab.go.id/pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/

Ilmi, A. B. (2026). *Wawancara Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja*.

Irawan, A. S. (2022). MaqaShid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *3*(1), 39–55. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/192

Jaelani, M. A., & Fidaris, N. (2024). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi(JIIA)*, *14*(2), 151–162. https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4953

Judith, R. B. (2024). *Navigating Formalization of Street Vending: The Case of Street Vendors in Kigali City, Rwanda* [Erasmus University]. https://thesis.eur.nl/pub/75796/

Khairi, D. A., & Marsoyo, A. (2022). Sektor informal : peninjauan kembali dalam perspektif konseptual. *REGION Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, *17*(2), 365–383. https://doi.org/10.20961/region.v17i2.47072

Marcella, G. A., & Kriswanto, H. D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan Kopi Sangan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *5*(3), 510–523. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i3.22116

Munishi. (2022). Constraints To Accessing Business Development Services And Support (Bdss) Among The Urban Street Vendors In Dar Es Salaam Tanzania. *African Journal of Applied Research*, *8*(2), 14–29. https://dspace.cbe.ac.tz/items/ce76eafa-8942-4741-90b2-36a0af17fab8

Murti, A. (2021). Menelaah Pemikiran Jassr Auda dalam Memahami Maqashid Syariah. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *1*(2), 60–67. https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9

Nurlita, V. (2026). *Analisis Maqāṣid Al-Sharīah terhadap Retribusi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Dusun Tambang Desa Kedungbanteng)* [Universitas Islam Negeri KIAI Ageng Muhammad Besari Ponorogo]. https://etheses.uinponorogo.ac.id/39134/

Oktaviani, Y. (2023). *Tipologi Aktivitas Pedagang Kaki Lima dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Kota Semarang (Studi Kasus : Kawasan Simpang Lima, Taman Indonesia Kaya, dan Aloon Aloon Kauman)*. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/235288

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. (2019). *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 tahun 2019*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. (2022). *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. (2025). *Penyelenggaraan Reklame*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/338322/perda-kab-pekalongan-no-1-tahun-2025

Pramono, W., & Hanandini, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI*.

Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, *9*(2), 241–254. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/38301/33776/53717

Purnama, A., Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima kawasan Tugu Keris Kota Baru). *JURNAL DEVELOPMENT*, *12*(2), 174–183. https://jurnal.umjambi.ac.id/JD/article/view/495

Purwanto, H. (2026). *Wawancara Petugas Retribusi*.

Rahman, A., Madani, M., & Usman, J. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, *3*(1), 7–16. https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4901

Ramadan, A., Uceng, A., Erfina, & Muhammad, N. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, *17*(1), 114–123. https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/64765

Ramadhan, T. S. R. (2024). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci)* (pp. 1–67). https://repository.uin-suska.ac.id/84602/

Rofiqi, A., Haris, R. A., Yuliastina, R., & Alfiyah, N. I. (2025). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus pada PKL di Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara). *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, *20*(2), 101–119. https://ejournal.wiraraja.ac.id/index.php/FISIP/article/view/4914

Sakinah, S., Sa'diyah, K., & Hermawati, R. (2024). Peran Paguyuban dalam Pemberdayaan Pedagang Asingan Ikan Asin di Lokasi Obyek Wisata Pantai Pangandaran. *Biokultur Journal*, *13*(2), 90–107. https://doi.org/10.20473/bk.v13i2.60151

Sakir, A. R., Arni, Lukman, J. P., & Rajab, M. (2024). Upaya Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Soppeng. *FOKUS:*

*Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, *22*(1), 62–77. https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/1047

Setitit, P., Hammar, R. K. R., & Siswani, C. B. (2025). Effectiveness of Regional Regulation Implementation in Guidance and Protection of Street Vendors in Manokwari Regency : A Study of Policy Analysis and Socio-Economic Impacts. *GOLDEN RATIO OF LAW AND SOCIAL POLICY REVIEW VOLUME*, *5*(1), 128–141. https://www.goldenratio.id/index.php/grlspr/article/view/1565

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); Cetakan ke). ALFABETA.

Sulihin. (2026). *Wawancara Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kajen*.

Sunarko, V. R. C., Dwiyanti, T. M., Risty, A. S. M., Ananda, A. R., Mumtazah, S. S., & Reviandani, O. (2024). Peran Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Kota Surabaya Dalam Pemulihan Keberlanjutan Sentra Wisata Kuliner Wonorejo. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(5), 9190–9225. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16019/10865

Taryudi, M. (2026). *Wawancara Pengurus Paguyuban*.

Toni. (2026). *Wawancara Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kajen*.

Vega, R. A., Alvania, B., Wibisono, A. D., & Wijayanto, H. (2025). Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Wisata Kuliner Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *2*, 133–144. https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/8269/6300

Wage, S., Effendi, S., Hakim, A. R., Banjarnahor, H., & Mardika, H. (2023). Pelatihan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Perumahan Buana Impian Kota Batam. *Jurnal Pengabdian Barelang*, *05*(01), 22–26. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jpkm/article/download/6629/3079

Widjajanti, R., Kurniawati, W., Murbana, P. A. F., & Saputri, W. A. E. (2023). Spesifikasi Ruang Aktivitas Pkl Di Kota Kajen, Pekalongan. *Jurnal Pengembangan Kota*, *11*(2), 167–180. https://doi.org/10.14710/jpk.11.2.167-180

Yasmin, A. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Persfektif Fiqh Siyasah Di Pasar Pagi Curup Tengah* (pp. 1–78). https://e-theses.iaincurup.ac.id/8555/

Yudhawati, D., & Pabbajah, M. (2025). Kebermaknaan Hiduo dalam Organisasi Berbasis Paguyuban: Perspektif Psikologi Positif. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, *8*(1), 247–268. https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/download/865/303

Zakiya, D. R., & Prastyawan, A. (2025). Evaluasi Dampak Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Di Kbupaten Bojonegoro (Studi Pada PKL Alun-Alun

Kabupaten Bojonegoro). *Inovant*, *3*(1), 142–155. https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/38315

Zikni. (2026). *Wawancara Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kajen*.